

KELAPA SAWIT, DAMPAKNYA TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN¹

Oleh: Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
Peneliti Senior Universitas Riau
<http://almasdi.unri.ac.id>

A. Pendahuluan

Secara kuantitatif pelaksanaan pembangunan di daerah Riau telah mencapai hasil yang cukup baik seperti yang terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 8,40%, pertumbuhan yang tinggi ini ditopang oleh sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan. Pada tahun 1996 sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi rakyat pedesaan Riau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2 % sementara sektor industri melaju sebesar 14 persen. Namun pada tahun 2002 sektor pertanian sudah mulai membaik dengan angka pertumbuhan sebesar 6,06 persen, sedangkan sektor industri 12,47 persen. Selama periode 2002-2007 pertumbuhan sektor pertanian cukup baik yaitu sebesar 6,79. Tingginya pertumbuhan sektor pertanian karena ditunjang oleh tanaman perkebunan yang berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, karet, kelapa dan sebagainya (Almasdi Syahza, 2007a).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Kesenjangan di daerah ini semakin diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan non-pertanian (ekonomi perkotaan).

Perkembangan sektor pertanian di daerah Riau sampai saat ini secara kuantitatif cukup menggembirakan, yaitu dengan rataan pertumbuhan selama lima tahun terakhir sebesar 6,79%. Namun tingkat pendapatan masyarakat dari usaha pertanian belum meningkat seperti yang diharapkan. Karena itu Pemerintah Daerah Riau mencanangkan pembangunan Daerah Riau melalui program

¹ Makalah disampaikan pada Pertemuan Pengusaha Perkebunan Besar se Kabupaten Pelalawan, Hotel Ibis tanggal 26 November 2008, Pekanbaru

pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal dengan program K2I). Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Riau harus mengacu kepada Program K2I. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan, khususnya sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kelapa). Sampai saat ini kelapa sawit merupakan tanaman primadona masyarakat Riau.

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit. Kondisi daerah Riau yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi Daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, Daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2002). Untuk lebih jelasnya perkembangan luas areal komoditi unggulan perkebunan di Daerah Riau disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan Luas Areal Komoditi Utama Perkebunan di Propinsi Riau Tahun 2002–2006 (dalam ha)

Tahun	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet
2002	1.312.661	622.796	566.130
2003	1.340.306	633.157	547.123
2004	1.392.232	639.340	544.735
2005	1.486.989	550.052	543.783

2006	1.530.150	546.927	528.697
Pertumbuhan (%)	3,90	-3,25	-1,67

Sumber: Dinas Perkebunan Propinsi Riau, 2007

Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga memperhatikan pemerataan perekonomian antar golongan dan antar wilayah. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya.

Tulisan ini mencoba mengidentifikasi dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit terhadap percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan. Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mengangkat perekonomian masyarakat khususnya mereka yang bermata pencaharian dari sektor pertanian. Dampak dari pembangunan tersebut akan terlihat dari beberapa indikator, antara lain:

1. Angka *multiplier effect* ekonomi yang diciptakan dari kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit di pedesaan
2. Indek kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai akibat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit.
3. Indek kesenjangan ekonomi antar golongan dan antar wilayah

B. Multiplier Effect Ekonomi

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2005), pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya.

Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan kelapa sawit, tercermin dalam terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan. Begitu juga timbulnya kesempatan berusaha, seperti: membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta jasa perbankan. Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-pasar tradisional di daerah permukiman dan pedesaan. Dengan demikian pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari sisi lain menyebabkan pola konsumsi dan pendidikan masyarakat akan meningkat pula (Almasdi Syahza, 2007a).

Sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian, tujuan utama pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah 1) menumbuhkembangkan usaha kelapa sawit di pedesaan yang akan memacu aktivitas ekonomi pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan 2) menumbuhkan industri pengolahan CPO dan produk turunannya serta industri penunjang (pupuk, obat-obatan dan alsin) dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah CPO dan produk turunannya (Almasdi Syahza, 2003).

Dari potensi yang ada, maka pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau juga akan membuka peluang pembangunan industri hulu-hilir kelapa sawit, membuka peluang usaha, tumbuhnya diversifikasi usaha, dan meningkatkan sumber devisa bagi daerah Riau. Pembangunan ini juga akan membuka peluang kerja di daerah dan akan menumbuhkan sektor ekonomi lainnya yang pada gilirannya akan memunculkan daerah-daerah baru sebagai pusat-pusat pertumbuhan wilayah (Almasdi Syahza, 2007a).

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru,

pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, dan percetakan genteng), buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

Selain besaran jumlah pendapatan pada masing-masing rumah tangga petani kelapa sawit, hal yang perlu dicermati dalam mengamati dampak pelaksanaan investasi perkebunan adalah timbulnya usaha-usaha baru yang dikelola oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung maupun sebagai akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh tidak langsung dari pembangunan perkebunan yang memungkinkan terbukanya peluang usaha lainnya.

Suatu peluang usaha akan menjadi sumber pendapatan yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menangkap peluang usaha yang potensial dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menangkap peluang itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan mengorganisir sumberdaya yang dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang potensial menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasionalkan.

Walaupun tidak semua kegiatan perkebunan memberikan atau menyebabkan timbulnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, namun tergantung kepada jenis investasi perkebunan (inti atau plasma) dan sektor ekonomi yang akan dilakukan. Investasi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh kepada seberapa besar manfaat kegiatan perkebunan memberi tetesan pada masyarakat sekitarnya. Kebijakan pemerintah dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan perkebunan sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan variasi sumber-sumber pendapatan yang muncul kemudian.

Secara umum dapat diungkapkan bahwa dengan adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Data lapangan mengungkapkan pada

umumnya masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet). Pada masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kondisi sebelum pembangunan perkebunan dengan setelah adanya kegiatan perkebunan pendapatan masyarakat semakin beragam. Keragaman ini semakin memperkuat stabilitas struktur pendapatan rumah tangga karena memberikan alternatif pemasukan bagi keluarga pada saat sumber pendapatan lain mengalami kegagalan usaha. Rataan pendapatannya dari masyarakat pedesaan dari kelapa sawit sebesar 87,64% dan 12,36% bersumber dari pendapatan di luar perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Apabila dikaji dari struktur biaya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Penelitian Almasdi Syahza (2006), pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan dampak ekonomi secara berantai, ini ditunjukkan dengan angka pengganda sebesar 2,48. Nilai ini dapat memberikan arti bahwa setiap

pembelanjaan oleh petani kelapa sawit di lokasi dan sekitarnya sebesar Rp 100, secara sinerjik menjadikan perputaran uang di lokasi tersebut dan sekitarnya sebesar Rp 248 melalui bentuk-bentuk usaha, baik sektor riil maupun jasa. Nilai-nilai tersebut diperoleh dengan dasar dan asumsi sebagai berikut:

- 1) Persentase pendapatan petani sawit dibelanjakan di wilayah setempat (MPC) sekitar 84,15 %.
- 2) Kebutuhan kegiatan perkebunan kelapa sawit yang dapat dipenuhi di wilayah setempat (PSY) sebesar 70,97 %, antara lain:
 - Kebutuhan peralatan pertanian ringan yang digunakan dalam kelola teknis diproyeksikan mampu dipenuhi oleh wilayah setempat.
 - Pengadaan sarana prasarana penunjang yang disediakan oleh perusahaan perkebunan dan koperasi dapat dipenuhi oleh wilayah setempat.

C. Indek Kesejahteraan Masyarakat

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*forward linkages*). Proses *forward linkages* yang diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (Almasdi Syahza, 2007c). Semua aktivitas ini akan meningkatkan indik kesejahteraan masyarakat di daerah sekitarnya.

Pertumbuhan indik kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan meningkat sebesar 49 persen (Tabel 2). Pada tahun 1998 terjadi penurunan

indeks kesejahteraan sebesar $-1,09$. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 persen berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal.

Tabel 2. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau

Kelompok Pendapatan	1995 ¹⁾		1998 ²⁾		2003 ³⁾		2006 ⁴⁾	
	w	g	w	g	w	g	w	g
20% terendah	0,0805	-0,0084	0,1513	0,0708	0,1169	-0,0344	0,1172	0,0003
20% terendah kedua	0,1266	0,0090	0,1946	0,0680	0,1583	-0,0363	0,1590	0,0007
20% terendah ketiga	0,1438	-0,0056	0,2152	0,0714	0,1831	-0,0321	0,1691	-0,0140
20% terendah keempat	0,1955	-0,0119	0,2010	0,0055	0,2107	0,0097	0,2340	0,0233
20% tertinggi	0,4535	0,0167	0,2379	-0,2156	0,3309	0,0930	0,3280	-0,0029
Indek Pertumbuhan Kesejahteraan (G) ⁶⁾	0,49		-1,09		1,72		0,23	

umber: 1) Almasdi Syahza, 1995

2) Almasdi Syahza, 1998

3) Almasdi Syahza, 2003

4) Hasil survey, 2006

Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2003 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 172 persen. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 persen tertinggi sebesar 32,8 persen, sedangkan kelompok 60 persen terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan sebesar $-15,6$ persen. Namun pada tahun 2006 memperlihatkan indek pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit sangat dirasakan oleh kelompok pendapatan 40% terendah (miskin), ini dibuktikan dengan angka indek pertumbuhan kesejahteraan bernilai positif 0,23. Kelompok berpenghasilan tertinggi (20% tertinggi) justru mengalami penurunan kesejahteraan.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2003) menunjukkan, aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan

⁶⁾ $G = w_1g_1 + w_2g_2 + \dots + w_i g_i$; g_i adalah tingkat pertumbuhan sosial quantile ke i ; dan w_i merupakan bobot kesejahteraan kelompok quantile ke i .

perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Kegiatan pengusahaan perkebunan kelapa sawit baik dalam bentuk perusahaan maupun swadaya membutuhkan tenaga kerja langsung (tidak termasuk *skilled-labour*) dan tenaga teknis perkebunan dalam pengelolaannya. Secara ideal tenaga kerja direkrut dari masyarakat sekitar perkebunan, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan yang diambil dari masyarakat desa sekitarnya. Kegiatan perkebunan kelapa sawit ini menyerap tenaga kerja cukup banyak, di samping itu kegiatannya bersifat manual sehingga tenaga kerja manusia sangat diperlukan.

Adanya aktivitas kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, khususnya pengadaan sarana prasarana menyebabkan aktivitas dan mobilitas masyarakat makin tinggi. Hal ini berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan berusaha terutama dalam bidang jasa dan perdagangan.

Kegiatan pembangunan jaringan jalan juga meningkatkan mobilitas masyarakat, membantu masyarakat dalam pemasaran hasil pertaniannya. Di samping itu kebutuhan hidup masyarakat di pedesaan dapat dipenuhi dari hasil pertanian masyarakat itu sendiri. Pengadaan kebutuhan perusahaan dapat bekerjasama dengan masyarakat setempat. Ini merupakan salah satu dampak positif terhadap peningkatan kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar.

D. Indek Kesenjangan Ekonomi

Dari segi penanaman investasi yang dilaksanakan, hampir semua daerah kabupaten/kota memanfaatkan investasi. Tetapi kalau dilihat dari segi dampak ekonominya belum menunjukkan hasil yang diharapkan, hal ini disebabkan karena investasi pada beberapa daerah kabupaten/kota mempunyai *multiplier effect* yang kecil kecuali untuk sektor industri dan jasa di daerah perkotaan Dumai dan Pekanbaru.

Ada empat kemungkinan sebab mengapa fenomena ini terjadi. *Pertama*, investasi sektor industri di daerah kabupaten/kota yang menyebabkan disparitas spasial semakin membesar disebabkan oleh industri milik swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN bukan investasi pemerintah. Investasi sektor swasta lebih mengutamakan target keuntungan, sementara investasi pemerintah lebih mengutamakan nilai manfaat untuk masyarakat; *Kedua*, kemungkinan industri dengan fasilitas PMDN dan PMA di masing-masing daerah kabupaten/kota ada yang tinggi nilainya tetapi menimbulkan *multiplier effect* yang kecil sehingga tidak memperbesar PDRB daerah bersangkutan (seperti sektor pertanian). Sebaliknya investasi swasta dengan fasilitas PMA dan PMDN, walaupun nilainya kecil di suatu daerah kabupaten/kota tetapi mempunyai *multiplier effect* yang besar sehingga dapat mempertinggi PDRB daerah bersangkutan; *Ketiga*, penanaman investasi pada daerah kabupaten/kota baik PMDN maupun PMA terfokus pada sektor pertanian yang pengembalian tingkat investasinya dalam jangka waktu yang agak lama; dan *keempat*, kemungkinan investasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah baik swasta yang bersumber PMDN dan PMA tertanam pada sektor sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang kecil serta tingkat pengembaliannya yang lambat.

Subsektor perkebunan memberikan kontribusi pembangunan di pedesaan, sehingga dapat menekan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Besarnya indeks Williamson antar daerah kabupaten/kota pada tahun 2003 sebesar 0,5060. Pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 0,4429 dan terus menurun sehingga pada tahun 2007 angka indeks Williamson hanya sebesar 0,3327. Penurunan indeks ketimpangan ini lebih banyak disebabkan kegiatan perkebunan menyebabkan mata pencaharian masyarakat tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Kegiatan ini menimbulkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi

pedesaan, antara lain: memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

E. Potensi Pengembangan ke Depan

Begitu pesatnya perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya swadaya murni, maka perlu dirancang suatu model untuk menghindari ketimpangan pendapatan antara petani plasma dan swadaya. Model yang dirancang untuk peningkatan kesejahteraan petani di pedesaan adalah dalam bentuk Agroestate Berbasis Kelapa sawit (ABK).

Model yang disajikan ini dimaksudkan untuk mencoba menetralkan dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) dengan perusahaan inti, di samping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini hanya terbatas untuk perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan perusahaan (inti). Pemilikan petani hanya sebatas kebun yang telah ditentukan dalam program plasma, sementara pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan inti. Untuk ke depan perlu dipikirkan model bentuk kemitraan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham pada pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. Melalui program ABK ini petani memperoleh kesempatan untuk membeli/memiliki saham di PKS perusahaan inti.

Jaminan ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu agroindustri termasuk industri minyak sawit. Keterkaitan antara sumber penghasil bahan baku dan agroindustri kelapa sawit harus diintegrasikan ke dalam suatu pemilikan. Konsep kemitraan ini menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahataniya maupun pabrik pengolahannya, dimana pengelolaannya dilakukan oleh koperasi petani.

Aplikasi berorientasi kepada kesejahteraan petani melalui penekanan efisiensi pengolahan usahatani yang produktif serta peningkatan nilai tambah

dalam konteks agribisnis, dimana kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.

Dalam model ABK ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri. Model merupakan konsep pembangunan perkebunan di pedesaan untuk masa datang, konsep ini dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan pengembang.

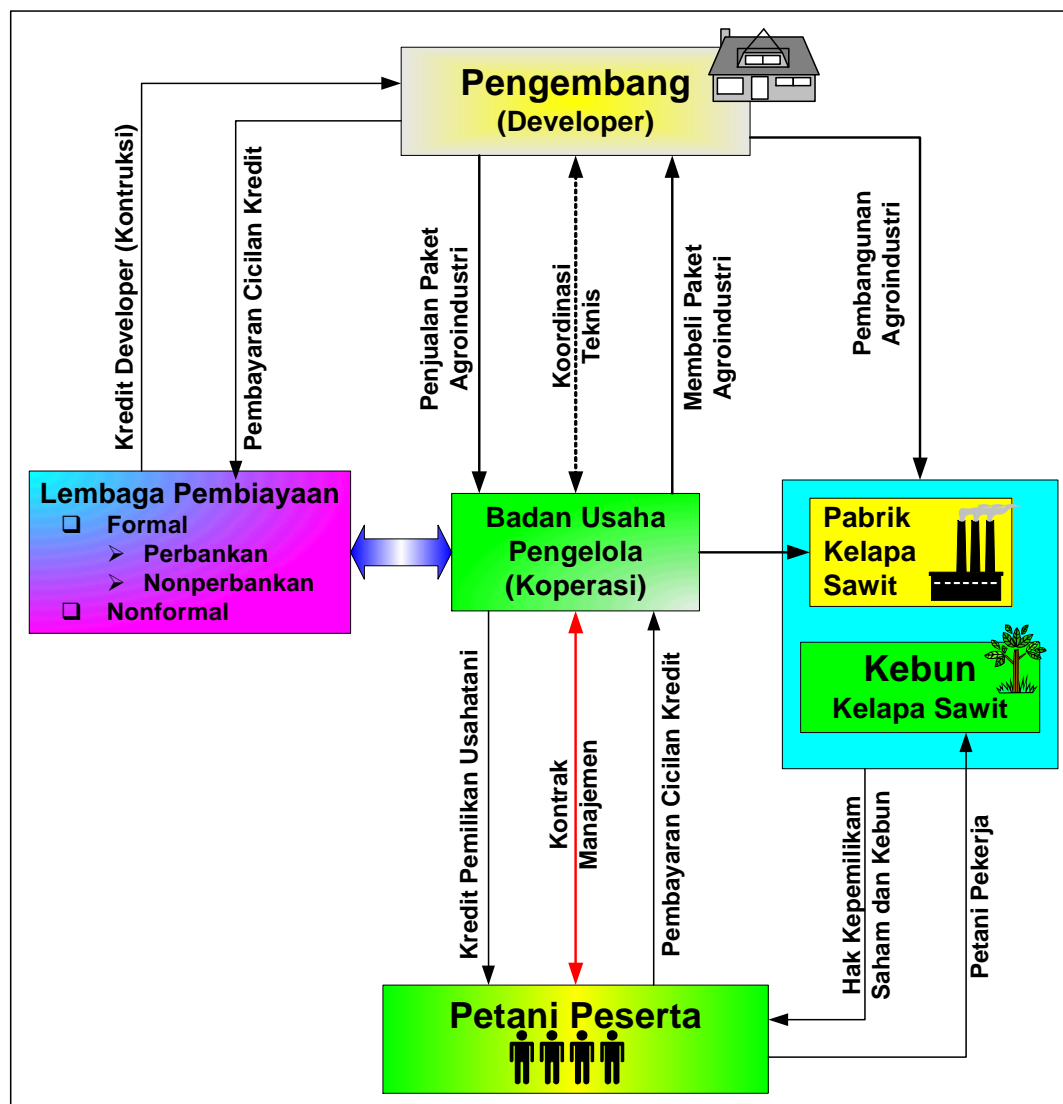
Model ABK dirancang untuk pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan yang berbasis pertanian (perkebunan kelapa sawit). Model ABK ini bertujuan untuk membangun perkebunan berbasis kelapa sawit yang diperuntukkan bagi petani yang belum mempunyai lahan perkebunan dan atau bagi petani yang memiliki lahan tetapi tidak punya modal usaha untuk pengembangan usahatannya. Petani ini sama sekali tidak mempunyai lahan yang layak untuk jaminan kehidupannya atau tidak mempunyai lahan untuk hidup layak bagi keluarga petani.

Secara singkat konsep model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit (ABK) yang akan melibatkan masyarakat pedesaan (bagi petani yang belum memiliki lahan perkebunan) disajikan pada Gambar 1. Untuk lebih jelasnya model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ❑ Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.
- ❑ Kebun dan pabrik yang sudah dibangun oleh developer dijual dalam bentuk unit kaveling atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat pedesaan.

Sebagai pemilik kebun petani peserta akan menerima sertifikat pemilikan tanah dan sebagai bukti pemilikan pabrik petani peserta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.

- ❑ Para petani peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee) yang besarnya telah ditentukan didalam kontrak manajemen berdasarkan kesepakatan. Perusahaan jasa manajemen akan mengelola kebun dan pabrik dengan prinsip-prinsip manajemen perkebunan yang terbaik dan profesional.
- ❑ Kepemilikan modal PKS bagi petani peserta dibatasi maksimum 40 % dari total modal kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga profesional pengelolaan PKS. Model pemilikan saham dapat dilihat pada Gambar 2.
- ❑ Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan (KPH) dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai kesepakatan.
- ❑ Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena dapat berasal dari berbagai sumber. Bagi petani aktif pendapatannya akan bersumber dari hasil panen kebun miliknya, upah kerja, dan dividen saham pabrik. Keunggulan lain adalah kontinuitas bahan baku untuk PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.
- ❑ Perusahaan pengembang (developer) akan mengembalikan modal yang dipakai (dana sendiri, dan pinjaman dari lembaga pembiayaan) dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun.

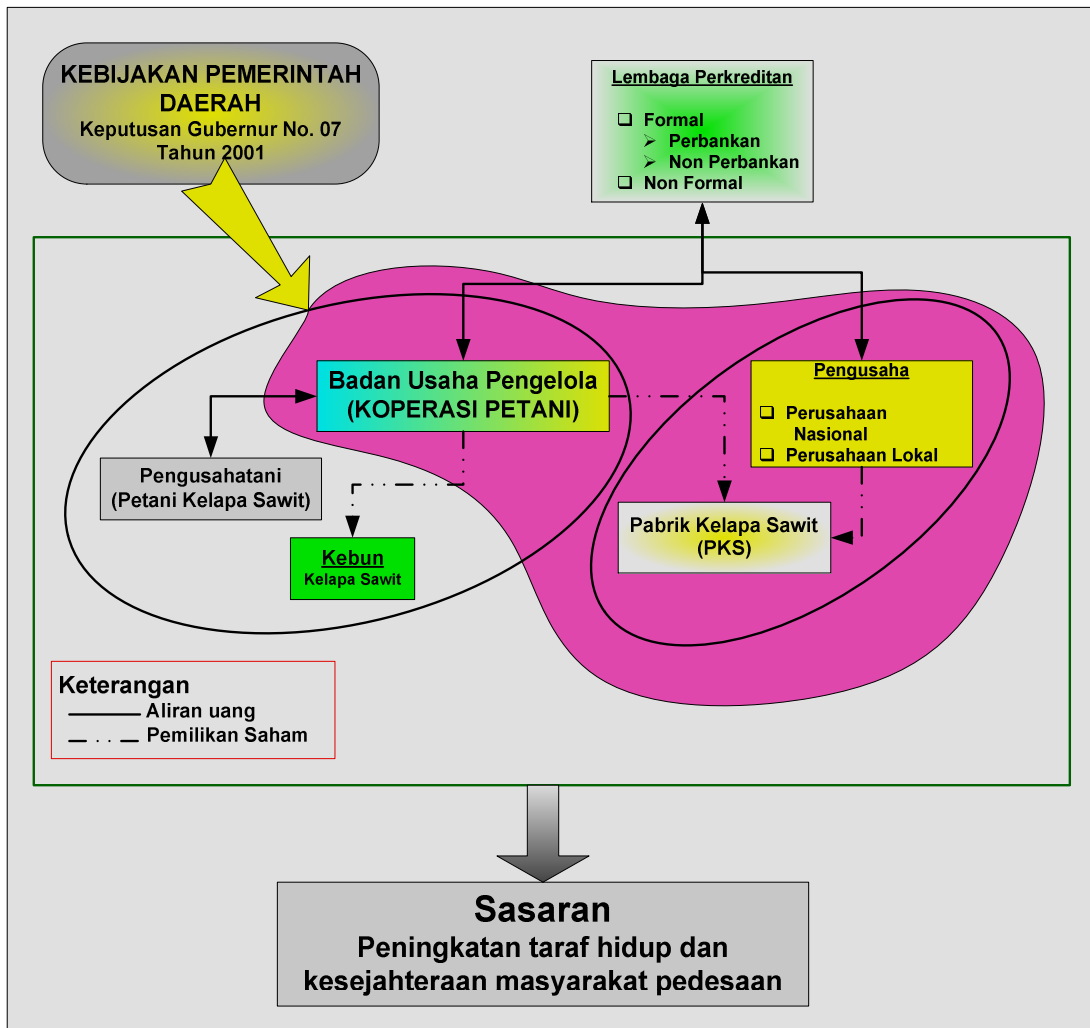


Gambar 1 Skema Konseptual Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit di Pedesaan

Pengembangan model ABK bagi petani di pedesaan yang telah memiliki lahan untuk dikembangkan perkebunan kelapa sawit, namun mereka tidak mempunyai modal usaha yang memadai untuk pengembangan perkebunan, maka dikembangkan melalui model ABK pola kemitraan. Bentuk kegiatannya adalah pengembangan perkebunan melalui pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga keuangan perbankan atau non perbankan. Tujuannya adalah membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru atau wilayah yang sudah ada dengan teknologi maju agar petani mampu memperoleh pendapatan yang layak. Juga mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang bersifat agribisnis dengan memasukkan berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil secara terpadu.

Pelaksanaan pembangunan perkebunan model ABK pola kemitraan dilakukan oleh perusahaan di bidang perkebunan yang ditunjuk sebagai perusahaan inti (mitra) dengan pembinaan dan dukungan instansi-instansi pemerintah daerah yang fungsinya terkait dengan pengembangan perkebunan. Kemitraan yang dianut dalam pengembangan usaha perkebunan dengan memanfaatkan fasilitas kredit adalah pola kemitraan inti dengan plasma (petani). Dalam hubungan kemitraan ini petani diwakili oleh suatu badan usaha yang dibentuk langsung oleh petani yaitu koperasi. Koordinasi pembinaan proyek perkebunan model ABK pola kemitraan ini dilaksanakan oleh Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi dan Kabupaten yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati. Dengan demikian kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan koperasi berlangsung secara utuh dan berkesinambungan.

Program ABK Pola Kemitraan memberikan peluang kepada petani peserta untuk memiliki saham pada PKS. Tatacara pemilikan saham ini dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara petani dalam hal ini diwakili oleh koperasi dengan perusahaan inti dan pemerintah melalui instansi yang terkait. Pada program ini disarankan pemilikan saham pada PKS sebaiknya melibatkan tiga komponen, yaitu: petani melalui koperasi; perusahaan inti; dan pemerintah daerah. Sedangkan komposisi dari pemilikan saham dapat diatur berdasarkan kesepakatan dari ketiga komponen tersebut. Rancangan pemilikan modal PKS melalui Program ABK pola kemitraan juga sama dengan model pemilikan modal pada ABK petani baru yang telah disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Rancangan Kepemilikan Modal pada Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit di Pedesaan.

Pustaka Acuan

- Almasdi Syahza., 2002. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta: halaman 45-51.
- ., 2003. Prospek Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran: Halaman 68-77.
- ., 2004. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 6 No 3, November 2004, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung: halaman 217-231.
- ., 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. X/03/November/2005. Jakarta: PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara: Halaman 220-231.
- ., 2007a. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonomomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta: halaman 106-118.
- ., 2007c. Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Kesejahteraan Petani Di Daerah Riau, dalam *Jurnal Sorot*, Vol 1 No 2, Oktober 2007, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru: Halaman 92-103.
- ., 2008. *Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau*, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Balitbang Depatemen Pertanian, 2005, Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit, <http://www.deptan.go.id>, diakses 18 November 2006.
- BPS., 2007a, *Riau Dalam Angka*, Kerjasama BPS dengan Bappeda Propinsi Riau, Pekanbaru.
- ., 2007b, *Pendapatan Regional Riau Menurut Lapangan Usaha*, Kerjasama BPS dengan Bappeda Propinsi Riau, Pekanbaru.
- BPPT, 2006, BPPT Pelopori Pabrik Kelapa Sawit Mini, http://www.bppt.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1865&Itemid=3, diakses 3 Februari 2008
- Dinas Perkebunan Propinsi Riau., 2007, *Laporan Tahunan*, Dinas Perkebunan Propinsi Riau, Pekanbaru.

- Didiek H Goenadi., 2005, *Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kelapa Sawit di Indonesia*,
http://www.bppt.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1865&Itemid=3, diakses 18 November 2007.
- Iyung Pahan, 2007, *Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir*, Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wiwik Suhartiningsih., 2003, Membangun Agroindustri Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Usahawan Indonesia* No 02/TH.XXXII Februari 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Yuswar Zainal Basri., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

RIWAYAT HIDUP

Prof. Dr. H. Almasdi Syahza, SE., MP, lahir di Tanjung Alam tanggal 22 Agustus 1960. Setelah tamat dari SMA Negeri 1 Bukit Tinggi tahun 1981, melanjutkan pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Tahun 1986. Saat ini telah dikurnia tiga orang putra dan putri yaitu: Brilliant A.Smit; Honest H. A.Smit; dan Putri Fadhillah A,Smit.



Tahun 1993-1995 melanjutkan pendidikannya ke Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (PPS Unpad) pada bidang studi Ekonomi Pembangunan Pertanian, memperoleh gelar Magister Pertanian (MP). Tahun 2001-2004, kembali melanjutkan studi di PPS Unpad bidang kajian utama Ekonomi Pedesaan, dan berhasil memperoleh gelar Doktor.

Sejak tahun 1997 telah aktif melakukan penelitian, mengikuti seminar, dan menulis artikel pada jurnal penelitian. Selama periode 1997-2008, telah melakukan 55 buah kegiatan penelitian. Telah menghasilkan tulisan sebanyak 21 buah yang dimuat di jurnal terakreditasi, dan 16 buah yang dimuat pada prosiding dan jurnal non terakreditasi. Berkat keyakinannya sebagai peneliti, pada tahun 2000 terpilih sebagai peneliti terbaik universitas Riau, tahun 2001 terpilih sebagai peneliti terbaik Dosen Muda oleh DP2M Dikti Jakarta. Tahun 2002 kembali memperoleh peneliti terbaik bidang Sosial yang diadakan oleh Lembaga Penelitian Universitas Riau. Prestasi kerja diperolehnya lagi pada tahun 2005, yaitu terpilih sebagai dosen berprestasi di tingkat Universitas Riau. Pada tahun 2007 oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas Riau menetapkan Prof. Dr. Almasdi Syahza sebagai dosen bermutu di bidang pembelajaran tingkat universitas. Pada tahun 2008 kembali terpilih sebagai peneliti terbaik melalui penelitian Fundamental oleh DP2M Dikti Jakarta.

Tepatnya tanggal 14 Januari 2005, diberikan kepercayaan oleh Rektor Universitas Riau menjabat Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Riau sampai tahun 2006. Sejak Mei 2006 menjadi Ketua Badan Penjaminan Mutu di FKIP Universitas Riau. Kepadanya juga diberikan kepercayaan sebagai Kepala Badan Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (BPKPEM) Universitas Riau.

Dengan penuh keyakinan melaksanakan tridarma perguruan tinggi, aktif dalam proses pembelajaran, tekun dalam penelitian, rajin mengikuti seminar dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat, akhirnya Menteri Pendidikan Nasional sejak 1 Mei 2005 memberikan jabatan akademik tertinggi yakni Guru Besar Tetap (Profesor) dalam bidang ilmu Ekonomi Pembangunan Pedesaan pada Universitas Riau.

Dalam sehari-hari aktif mengajar di program S1 dan Pascasarjana Universitas Riau dan Universitas Islam Riau. Sejak tahun 2007 menjadi anggota Dewan Riset Daerah Propinsi Riau, sebagai asesor sertifikasi guru dan dosen di Universitas Riau, tim penilai pusat angka kredit Kenaikan Pangkat Guru.